

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DI BPKAD
KABUPATEN SORONG SELATAN**

Diana Herce Momot

NPP 32.1103

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 32.1103@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Fitri Yul Dewi Marta, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Digital transformation in the public sector demands the implementation of an effective information system to support transparency and accountability in regional financial management. The phenomenon of the complexity of financial management in the era of regional autonomy requires a comprehensive monitoring and accountability mechanism through information technology. This study identifies the main problems in the implementation of the Regional Government Information System for financial management accountability at the BPKAD of South Sorong Regency, including limited system integration, minimal human resource competence in mastering information technology, and less than optimal use of data for strategic decision making. The impacts include low levels of transparency in financial reports, slow internal audit processes, and hampered accessibility of information for external stakeholders. **Purpose :** This study aims to analyze the accountability of financial management through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sorong Regency. **Method:** Based on Case Studies using a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with key stakeholders in South Sorong Regency from the BPKAD Secretary, BPKAD Employees and SIPD Operators. The use of accountability theory in research with interview data was analyzed and triangulated with observation and documentation data. **Results:** The implementation of SIPD at the BPKAD of South Sorong Regency has increased transparency and accelerated the financial management process through open data access and real-time monitoring. However, obstacles such as limited human resources who master technology, uneven internet infrastructure, and limited devices still hinder system optimization. Continuous training and technical improvements continue to be carried out to maintain accountability and sustainability of regional financial management. Thus, SIPD has the potential to support financial management accountability, although it still needs strengthening in several aspects. **Conclusion:** Accountability of financial management through the Regional Government Information System (SIPD) at the BPKAD of South Sorong Regency has shown significant progress, although it still faces various obstacles. The implementation of SIPD has been running digitally and transparently, helping the planning, implementation, and budget reporting process to be more accurate and accountable. However, coordination between work units and socialization of system use still need to be improved so that all employees can optimize the use of SIPD.

Keywords: Accountability, SIPD, Financial Management, Regional Government, BPKAD of South Sorong

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital dalam sektor publik menuntut implementasi sistem informasi yang efektif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fenomena kompleksitas pengelolaan keuangan pada era otonomi daerah memerlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang komprehensif melalui teknologi informasi. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, meliputi keterbatasan integrasi sistem, minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis. Dampak yang ditimbulkan mencakup rendahnya tingkat transparansi laporan keuangan, lambatnya proses audit internal, dan terhambatnya aksesibilitas informasi bagi stakeholder eksternal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan. **Metode:** Berbasis Studi Kasus menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama di Kabupaten Sorong Selatan dari pihak sekretaris BPKAD, Pegawai BPKAD dan Operator SIPD. Penggunaan teori akuntabilitas dalam penelitian dengan data hasil wawancara dianalisis dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengelolaan keuangan melalui akses data yang terbuka dan pengawasan real-time. Namun, kendala seperti keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, infrastruktur internet yang belum merata, dan perangkat yang terbatas masih menghambat optimalisasi sistem. Pelatihan berkelanjutan dan perbaikan teknis terus dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, SIPD berpotensi mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan, meski masih perlu penguatan di beberapa aspek. **Kesimpulan:** Akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Penerapan SIPD telah berjalan secara digital dan transparan, membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, koordinasi antar unit kerja serta sosialisasi penggunaan sistem masih perlu ditingkatkan agar seluruh pegawai dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD.

Kata kunci: Akuntabilitas, SIPD, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah, BPKAD Sorong Selatan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar terhadap pengelolaan data melalui sistem informasi yang kini menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem informasi, yang melibatkan integrasi perangkat keras, lunak, serta sumber daya manusia, mampu menghasilkan informasi yang akurat dan berguna. Di lingkup pemerintahan, sistem ini mendukung implementasi e-government, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui otomatisasi pencatatan transaksi, pembayaran daring, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat Daya, sebagai daerah hasil pemekaran, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu solusi yang diterapkan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diinisiasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah secara realtime (Nasution, 2021:109). SIPD mencakup informasi pembangunan, keuangan, serta aspek pemerintahan lainnya yang bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan SIPD sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun, pelaksanaan SIPD di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan menghadapi kendala seperti kurangnya tenaga operator yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan keterbatasan akses internet. Menurut wawancara dengan staf BPKAD dan data dari RRI, wilayah ini memiliki kecepatan internet rendah dan berada di peringkat ke-221 secara nasional. Selain itu, masih terjadi ketergantungan pada sistem lama (SIMDA), yang menyebabkan pekerjaan ganda dalam pelaporan keuangan karena data harus diintegrasikan ulang ke dalam SIPD.

Tabel 1. 1
Data Opini BPK terhadap OPD Sorong Selatan

Pemda	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Sorong Selatan (Opini)	WTP Wajar Tanpa Pengecualian	WTP Wajar Tanpa Pengecualian	WTP Wajar Tanpa Pengecualian	WTP Wajar Tanpa Pengecualian	WTP Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : [https://www.bpk.go.id/i\(06-Oktober-2024\)](https://www.bpk.go.id/i(06-Oktober-2024))

Meski menghadapi tantangan tersebut, penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari opini BPK yang secara konsisten memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Kabupaten Sorong Selatan sejak 2019 hingga 2023 (BPK, 2024). SIPD memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, evaluasi, pelaporan, serta manajemen SDM dan pelayanan publik, yang keseluruhannya berperan dalam meningkatkan transparansi pemerintahan daerah.

Implementasi SIPD juga mendukung amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses keuangan. Dalam hal ini, sistem informasi menjadi alat penting dalam pelaporan yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan dasar hukum kuat bagi daerah dalam mengelola urusannya, termasuk pengelolaan keuangan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pelaporan keuangan menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola, kepuasan publik terhadap akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi birokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan SIPD memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan. Fokus penelitian akan mencakup kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pelaporan keuangan, serta partisipasi publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penerapan sistem informasi yang baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara nasional telah banyak dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi dampaknya terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di daerah tertinggal atau dengan keterbatasan infrastruktur digital, seperti Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak difokuskan pada implementasi SIPD di daerah maju atau wilayah dengan infrastruktur memadai, sehingga belum menggambarkan tantangan unik yang dihadapi daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia, akses internet, dan sarana prasarana teknologi informasi. Selain itu, integrasi antara sistem lama (SIMDA) dan sistem baru (SIPD) yang masih dilakukan secara paralel di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan adanya masalah transisi sistem informasi yang belum diteliti secara mendalam, terutama terkait beban kerja ganda, potensi inkonsistensi data, serta dampaknya terhadap kualitas dan akurasi laporan keuangan. Penelitian sebelumnya belum cukup mengupas tentang efektivitas penerapan SIPD di wilayah dengan kapasitas operasional terbatas dan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini menunjukkan berbagai pendekatan dan hasil dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun aspek terkait pengelolaan informasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian oleh Tumija dan Erlambang (2023) menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berjalan baik dalam konteks perencanaan anggaran, berbeda dengan Kabupaten Sorong Selatan yang masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan. Wurara et al (2020) dalam studi di BAPPELITBANGDA Kota Manado juga mencatat bahwa implementasi SIPD belum optimal, mirip dengan kondisi di Sorong Selatan, meskipun berbeda dalam instansi yang dikaji. Sementara itu, Nasution dan Nurwani (2021) dalam kajiannya pada BPKAD Kota Medan menemukan bahwa SIPD telah dimanfaatkan secara luas untuk mendukung berbagai program kerja, kontras dengan Sorong Selatan yang masih dalam tahap awal pemanfaatan SIPD. Sudianing dan Seputra (2019) menyoroti peran SIPD dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, yang juga menjadi bagian dari fokus penelitian ini, meskipun dengan variabel yang berbeda. Penelitian oleh Alfani dan Nasution (2022) menekankan efektivitas dan efisiensi SIPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, berbeda dalam konteks sektor namun sejalan dari sisi evaluasi implementasi sistem.

Selain itu, beberapa studi internasional juga menjadi acuan penting dalam memperluas

pemahaman. Amnesti et al. (2025) menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam aplikasi pemerintahan, menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi juga harus memperhatikan aspek keamanan dan etika. Hu et al. (2025) menggunakan pendekatan simulasi untuk menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan insentif dalam tata kelola yang berkelanjutan, yang dapat diaplikasikan dalam konteks pengawasan pelaksanaan SIPD. Jia et al. (2024) menekankan bahwa ketersediaan informasi lokal sangat mempengaruhi efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, yang menunjukkan pentingnya data akurat dalam sistem informasi pemerintahan. Terakhir, Davy dan Buckingham (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan lokal dapat ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif komunitas, relevan dalam konteks SIPD yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Semua penelitian ini memberikan dasar kuat bagi penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan sejumlah studi sebelumnya yang mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian oleh Tumija dan Erlambang (2023) di Kabupaten Ogan Komering Ulu berfokus pada perencanaan anggaran, sedangkan penelitian ini menyoroti dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan secara lebih komprehensif, mencakup transparansi, responsibilitas, dan keberlanjutan dalam konteks Kabupaten Sorong Selatan yang menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Demikian pula, studi Wurara et al (2020) pada BAPPELITBANGDA Kota Manado menekankan kendala implementasi SIPD namun pada instansi yang berbeda, sementara penelitian ini berfokus pada BPKAD sebagai aktor utama dalam tata kelola keuangan daerah. Nasution dan Nurwani (2021) meneliti BPKAD Kota Medan yang sudah berada pada tahap pemanfaatan SIPD secara optimal, berbeda dengan penelitian ini yang memotret fase awal implementasi di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet.

Sudianing dan Seputra (2019) lebih menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat melalui SIPD, sementara penelitian ini menitikberatkan pada akuntabilitas keuangan sebagai ukuran kinerja tata kelola publik. Penelitian oleh Alfani dan Nasution (2022) pada sektor Disperindag di Provinsi Sumatera Utara memiliki fokus sektor yang berbeda, yaitu industri dan perdagangan, bukan keuangan publik. Di tingkat internasional, studi oleh Amnesti et al. (2025) menyoroti aspek perlindungan data pribadi dalam aplikasi pemerintahan lokal, yang memperkuat argumen bahwa penggunaan teknologi informasi harus mempertimbangkan keamanan dan etika, tetapi tidak secara langsung menelaah efektivitas sistem dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, Hu et al. (2025) menggunakan pendekatan simulasi dalam tata kelola keselamatan kerja di industri, memberikan sudut pandang kuantitatif dan makro yang berbeda dari pendekatan studi kasus kualitatif di level pemerintahan daerah yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Jia et al. (2024) menunjukkan pentingnya informasi lokal untuk efektivitas pemerintahan, selaras dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan pemanfaatan data SIPD yang belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Terakhir, studi Davy dan Buckingham (2025) menyoroti pentingnya strategi komunikasi dalam partisipasi masyarakat terhadap kebijakan lokal, relevan secara konseptual namun berbeda fokus karena penelitian ini mengkaji akuntabilitas internal keuangan pemerintah daerah, bukan keterlibatan publik secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam memahami hambatan dan potensi implementasi SIPD secara lebih mendalam di daerah tertinggal seperti Kabupaten Sorong Selatan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis berbasis konteks lokal.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan.

II.METODE

Pendekatan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan secara sistematis dengan metode ilmiah yang sesuai kondisi lapangan (Sugiyono, 2012). Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif yang menggunakan data berbentuk angka, dan kualitatif yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata (Nurdin dan Hartati, 2019). Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi bahasa alami dan menggunakan metode yang fleksibel (Nurdin dan Hartati, 2019). Data kualitatif biasanya diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi (Sugiyono, 2019). Ciri utama penelitian kualitatif meliputi lingkungan penelitian yang alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, serta analisis data secara induktif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretative, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual (Ridwan & Tungka, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan teori akuntabilitas dari Wicaksono (2015) yang mencakup dimensi transparansi, responsibilitas, akuntabilitas keuangan, dan keberlanjutan. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami fenomena secara kontekstual dan menyeluruh di lokasi penelitian. Operasionalisasi konsep dilakukan untuk memudahkan pengukuran variabel dan merumuskan pedoman wawancara serta observasi (Sugiyono, 2012). Pengambilan metode kualitatif dan studi kasus juga dipandang lebih sesuai untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan dinamika akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui SIPD yang kompleks dan multifaset.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen pendukung. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling untuk mendapatkan narasumber yang dianggap paling memahami objek penelitian, seperti pejabat dan staf BPKAD yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan SIPD, karena mereka merupakan informan kunci yang dapat memberikan data paling valid dan relevan. Selain itu, teknik accidental sampling juga digunakan bila terdapat kesempatan untuk memperoleh data tambahan dari pihak lain yang dianggap mendukung. Pemilihan informan kunci didasarkan pada peran strategis mereka dalam implementasi SIPD dan akuntabilitas keuangan, sehingga wawancara dengan mereka dapat memberikan wawasan komprehensif terkait permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara dan dokumentasi (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, menyiapkan pedoman wawancara; kedua, menyiapkan alat untuk wawancara; dan ketiga, mengatur waktu untuk wawancara agar berjalan lancar dan efektif (Simangunsong, 2017:215). Pendekatan wawancara ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas, sehingga peneliti dapat fokus memperoleh data yang mendalam dan berkualitas (Nurdin & Hartati).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mempelajari perilaku dan aktivitas sosial

secara langsung dalam konteks alami (Sugiyono, 2019). Wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memperoleh informasi mendalam secara langsung dari informan (Nurdin dan Hartati, 2019; Sugiyono, 2019). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, buku, peraturan, serta gambar yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahap utama: reduksi data untuk memfokuskan hal penting, penyajian data dalam bentuk narasi atau bagan agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi hasil analisis (Miles dan Huberman, 1994). Pendekatan ini bertujuan menemukan tema utama dari data dan mengembangkan hipotesis berdasarkan temuan lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk penyelesaian penulisan skripsi, yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan teori Akuntabilitas menurut Wicaksono (2015).

3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penerapan sistem informasi keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan sudah berjalan, namun masih menghadapi beberapa kendala. Koordinasi antar unit kerja kurang optimal, dan sebagian pegawai masih menggunakan cara lama meski sistem baru sudah tersedia. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan sistem perlu ditingkatkan agar pegawai dapat memaksimalkan fungsinya. Selain itu, infrastruktur seperti koneksi internet yang buruk, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala teknis signifikan. Terdapat juga kesenjangan antara rencana dan realisasi penggunaan sistem yang memerlukan evaluasi serta perbaikan dalam perencanaan, pelatihan, dan pengawasan.

3.2 Transparansi

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sorong Selatan memegang peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Salah satu bagian yang sangat vital adalah Bagian Perencanaan Keuangan, yang bertugas mengelola data dan informasi keuangan daerah secara sistematis dan terbuka. Dalam wawancara dengan Sekretaris BPKAD, Abdul Ahmad Huwalid, dijelaskan bahwa BPKAD berupaya memaksimalkan pemanfaatan SIPD agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan berjalan secara digital dan transparan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pengelolaan keuangan dapat diakses dengan jelas oleh publik. SIPD berfungsi sebagai platform digital yang memudahkan proses perencanaan dan pelaporan keuangan sehingga data keuangan dapat dipublikasikan secara terbuka. BPKAD memastikan bahwa seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan tersedia dan dapat diakses melalui berbagai media, termasuk website resmi pemerintah daerah dan aplikasi SIPD, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh laporan keuangan, rencana anggaran, dan data pendukung lainnya. Dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan sudah memenuhi dimensi transparansi sesuai dengan teori akuntabilitas Wicaksono (2015). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya informasi yang akurat dan terbuka mengenai akuntabilitas pengelolaan dan perencanaan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah.

3.3 Responsibilitas

Responsibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan menjadi perhatian utama meskipun menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Dalam wawancara dengan Sekretaris BPKAD, Abdul Ahmad Huwalid, dijelaskan bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, BPKAD memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memungkinkan pemantauan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara real-time, sehingga kendala SDM dapat diatasi dengan teknologi. Selain itu, pelatihan berkala juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar pengelolaan keuangan tetap bertanggung jawab dan efektif.

Teknologi SIPD bukan hanya berfungsi sebagai alat percepatan proses administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Staf Sekretariat BPKAD, Juliandry Christy, menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas selalu diutamakan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran, dan SIPD membantu dalam monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan SDM, BPKAD Sorong Selatan berkomitmen menjaga tanggung jawab penggunaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan pengawasan internal yang ketat guna memastikan akuntabilitas tetap terjaga.

3.4 Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi, khususnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara digital. Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat keras, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM), BPKAD terus berupaya memastikan sistem dapat berfungsi optimal. Sekretaris BPKAD, Abdul Ahmad Huwalid, menyatakan bahwa pemantauan berkala dan perbaikan teknis segera dilakukan agar proses pelaporan berjalan lancar dan akurat.

Selain itu, penggunaan SIPD membantu mengurangi potensi kesalahan manusia melalui verifikasi data yang ketat. Admin BPKAD, Daniel Tigori, menambahkan bahwa meskipun jumlah personel terbatas, kualitas laporan tetap dijaga dengan pelatihan dan workshop rutin bagi aparat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di berbagai tingkatan. Dengan demikian, melalui teknologi SIPD, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat, BPKAD Sorong Selatan berhasil menjaga akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan secara efektif meskipun menghadapi keterbatasan yang ada.

3.5 Keberlanjutan

Keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai, terutama di era digital saat ini. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi alat penting untuk mempercepat dan mempermudah proses perencanaan serta pelaporan keuangan. Dalam wawancara dengan Sekretaris BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Abdul Ahmad Huwalid, disampaikan bahwa meskipun tantangan infrastruktur, seperti kualitas jaringan internet yang kurang optimal, masih menjadi hambatan, pihak BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja SIPD melalui perbaikan perangkat dan peningkatan kualitas jaringan. Salah satu upaya yang direncanakan adalah memperkuat kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan internet guna memastikan akses internet yang lebih stabil dan merata.

Tabel 1.2
Sarana Dan Prasarana

No	Sarana & Prasarana	Fungsi	Spesifikasi	Ketersediaan	Keterangan
1.	Komputer	Mengoperasikan SIPD	Desktop atau laptop	1 Unit	1 unit milik kantor dan milik pribadi pegawai
2.	Perangkat Lunak	Menunjang proses pengelolaan keuangan pada SIPD	Aplikasi SIPD	Tersedia pada komputer	Baik
3.	Jaringan internet	Menghubungkan komputer dengan internet untuk akses data dan komunikasi	kecepatan rata – rata 8 Mbps lancar tergantung pada aktivitas yang dilakukan	Tersedia 2 unit	1 unit milik BPKAD dan 1 unit milik pegawai pribadi
4.	Admin SIPD di BPKAD	Yang mengoperasikan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan	2 Personil	2 Orang	1.Bapak Daniel Tigori,S.Ak. 2.Saudari Ludia Momot,S.Ak

Tabel sarana dan prasarana menunjukkan ketersediaan perangkat pendukung seperti komputer, perangkat lunak SIPD, jaringan internet dengan kecepatan rata-rata 8 Mbps, dan dua personil admin SIPD yang berperan dalam pengelolaan sistem. Meskipun perangkat dan sumber daya terbatas, BPKAD telah melakukan berbagai upaya optimalisasi penggunaan SIPD, termasuk keterbukaan informasi, pelatihan dan evaluasi sumber daya manusia, serta inovasi untuk menjamin keberlanjutan sistem dalam pengelolaan anggaran.

Dari analisis beberapa dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah berhasil mengidentifikasi berbagai titik lemah dan mengembangkan

strategi tepat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui SIPD. Harapannya, dengan perbaikan infrastruktur, penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi secara optimal, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat meskipun menghadapi tantangan yang ada.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan sudah berjalan namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti koordinasi antar unit yang belum optimal, resistensi pegawai terhadap sistem baru, serta kendala infrastruktur terutama koneksi internet yang kurang memadai di daerah terpencil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wurara et al. (2020) yang juga mengidentifikasi hambatan serupa dalam pelaksanaan SIPD di BAPPELITBANGDA Kota Manado, di mana keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat optimalisasi sistem. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Tumija dan Erlambang (2023) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaporkan implementasi SIPD telah berjalan dengan baik dan efektif, menunjukkan tingkat kesiapan dan dukungan yang lebih tinggi dalam pemanfaatan teknologi tersebut.

Dalam hal transparansi, penelitian ini mengungkapkan bahwa SIPD berperan penting dalam menyediakan akses terbuka terhadap data perencanaan dan pelaporan keuangan yang dapat diakses publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mendukung pandangan Sudianing dan Seputra (2019) yang menekankan bahwa pemanfaatan SIPD dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi. Di sisi lain, Nasution dan Nurwani (2021) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, pemanfaatan SIPD sudah melibatkan berbagai program kerja yang memfasilitasi transparansi yang lebih luas, yang menandakan bahwa Kabupaten Sorong Selatan masih berada pada tahap awal dalam optimalisasi fungsi transparansi SIPD.

Terkait responsibilitas, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, BPKAD Sorong Selatan tetap berkomitmen menjaga tanggung jawab penggunaan anggaran dengan memaksimalkan teknologi SIPD dan pelatihan berkala. Temuan ini konsisten dengan studi internasional seperti Hu et al. (2025) yang menyoroti pentingnya keseimbangan pengawasan dan insentif dalam tata kelola berkelanjutan melalui teknologi informasi. Selain itu, Amnesti et al. (2025) menekankan bahwa perlindungan data dan mekanisme pengawasan yang transparan sangat penting dalam sistem pemerintahan digital, yang mendukung peran SIPD sebagai alat pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan untuk keberlanjutan, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan infrastruktur memadai, seperti peningkatan kualitas jaringan internet dan perangkat keras, merupakan faktor kunci agar SIPD dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang. Rencana BPKAD untuk memperkuat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan internet menunjukkan upaya strategis dalam mengatasi hambatan infrastruktur. Hal ini selaras dengan temuan Jia et al. (2024) yang menggarisbawahi pentingnya ketersediaan informasi dan infrastruktur lokal dalam efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, Davy dan Buckingham (2025) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dan komunikasi yang baik merupakan elemen penting dalam keberlanjutan sistem pemerintahan digital, yang relevan dengan upaya BPKAD dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas melalui SIPD.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi dan tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Sorong Selatan dalam mengimplementasikan SIPD, yang pada

banyak aspek sejalan dengan temuan penelitian terdahulu baik di dalam maupun luar negeri. Meski masih ada kendala infrastruktur dan SDM, langkah-langkah strategis seperti pelatihan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kerjasama lintas sektor menjadi upaya penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Penerapan SIPD telah berjalan secara digital dan transparan, membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, koordinasi antar unit kerja serta sosialisasi penggunaan sistem masih perlu ditingkatkan agar seluruh pegawai dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD.

Dari segi transparansi, BPKAD berhasil menyediakan akses informasi yang terbuka dan akurat kepada publik melalui platform digital, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tanggung jawab pengelolaan keuangan tetap dijaga dengan baik meskipun terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM, berkat pelatihan berkala dan pengawasan internal yang diperkuat oleh teknologi SIPD.

Kendala infrastruktur, khususnya kualitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat keras, masih menjadi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas sistem. Meskipun demikian, BPKAD menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan keuangan dengan mengupayakan perbaikan infrastruktur dan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait.

Secara keseluruhan, BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah berhasil mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui SIPD. Dengan peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi yang optimal, diharapkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan terus meningkat, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada cakupan data yang terbatas pada satu instansi, yaitu BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap data internal juga mempengaruhi kedalaman analisis, khususnya dalam aspek teknis penggunaan SIPD dan evaluasi dampak jangka panjang. Penelitian ini juga belum membahas secara mendalam faktor eksternal seperti kebijakan pusat dan dukungan teknologi yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan beberapa daerah atau instansi berbeda guna mendapatkan gambaran komparatif yang lebih menyeluruh. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada evaluasi dampak penggunaan SIPD terhadap kinerja keuangan dan pelayanan publik secara kuantitatif. Selain itu, aspek keamanan data dan perlindungan privasi dalam implementasi SIPD layak untuk dikaji lebih dalam, mengingat pentingnya menjaga kepercayaan publik di era digital. Studi masa depan juga dapat meneliti strategi peningkatan kapasitas SDM serta optimalisasi infrastruktur teknologi yang berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan penelitian dan bersedia memberikan izin penelitian dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3496>
- Amnesti, W., Kusuma, S., Zulaichah, S., & Istiqomah, N. (2025). Legal protection of personal data security in Indonesian local government apps: Al Farabi's perspective. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.34623>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Davy, R., & Buckingham, L. (2025). Local government consultations in practice: Involving the community in food safety policymaking. *Cities*, 163, Article 106027. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106027>
- Hu, W., Ma, F., & Li, T. (2025). An evolutionary game and simulation study of work safety governance and its impact on long-term sustainability under the supervisory system. *Sustainability*, 17(2), Article 566. <https://doi.org/10.3390/su17020566>
- Jia, J., Li, R., Liu, C., & Ning, J. (2024). Local information and the stabilization role of local government: Evidence from a natural experiment in China. *Journal of Regional Science*, 64(4), 1265–1286. <https://doi.org/10.1111/jors.12700>
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Nasution, I. M., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112-133. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284>

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 123-138. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>

Wicaksono, K. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19, 17. <http://dx.doi.org/10.22146/jkap.7523>

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31423>

